

**KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PRASEJAHTERA**

PURNAMA SARI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada kaum perempuan yang termasuk ke dalam masyarakat prasejahtera di Dusun Gunungsari RT 05, memberikan pelatihan kreatifitas sebagai media peluang usaha dan melakukan pendampingan usaha. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat prasejahtera melalui pembentukan kelompok usaha bersama, memberdayakan potensi masyarakat prasejahtera khususnya kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan ekonomi lokal dan wilayah pada umumnya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Focus Group Discussion (FGD) untuk tahap evaluasi awal untuk mengetahui potensi peserta dalam membuat suatu produk yang akan dijadikan media usaha; (2) Metode ceramah untuk tahap sosialisasi program KUBE; (3) Metode demonstrasi untuk tahap pelatihan keterampilan pembuatan produk.

Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang termasuk ke dalam masyarakat prasejahtera di RT 05 Dusun Gunungsari; (2) Produk makanan kue kering, keripik pisang dan keripik singkong merupakan produk yang dijadikan media usaha bagi para peserta; (3) Pendampingan usaha dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha kecil.

Kata Kunci: *Kelompok Usaha Bersama, Masyarakat Prasejahtera*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan topik yang paling sering dibicarakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam RPJM 2010 – 2014 secara spesifik telah disebutkan bahwa target yang ingin dicapai adalah menurunkan penduduk miskin dari 16,7 % tahun 2004 menjadi 8,2 % tahun 2009 (Bappenas, 2007). Untuk

mengentaskan kemiskinan tersebut pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Pada tahun 2004 telah dikucurkan dana mencapai Rp 18 triliun, dan kemudian meningkat menjadi Rp 23 triliun pada tahun 2005. Sementara selama periode 2006 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun dan bertambah menjadi Rp 51 triliun pada tahun 2007 (Bappenas, 2007). Pada akhir Maret tahun 2009

anggaran kemiskinan sudah bertambah menjadi Rp 66,2 T dengan penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 1,27% dari tahun 2008 (BPS,2009). Anggaran kemiskinan yang besar tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.

Pemerintah Indonesia telah memberi perhatian yang besar dan sangat serius terhadap penanggulangan kemiskinan. Seluruh upaya dan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia sejak 2012 diintegrasikan ke dalam rencana induk (masterplan) percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI). Kebijakan ini mencakup seluruh program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah ada. Mulai dari pemberian bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan mikro, serta program prorakyat penyediaan prasarana/sarana murah. Program-program bantuan kemiskinan, diantaranya seperti Program Kartu Miskin, Program Beras Miskin, Program Bantuan Produktif seperti Kredit modal Usaha, Kredit Usaha Tani, Bantuan Bibit Pertanian Subsidi Pupuk, dll, Program bantuan Pendidikan dan Kesehatan, dan program-program kemiskinan lainnya.

Namun sayang, program pemberantasan kemiskinan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Terlihat belum memberikan dampak yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Sampai saat ini tingkat kemiskinan masih tetap tinggi di

Indonesia. Berdasarkan data BPS hingga September 2013, terlihat, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,55 juta. Sebanyak 11,47 persen dari total penduduk Indonesia, masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Angka ini bertambah 480.000 orang dibanding survei terakhir pada Maret 2013," ujar Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Kamis (2/1, 2014).

Di Indonesia pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam usaha meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan perlu digali cara-cara pengelolaan usaha yang paling sesuai. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pembinaan kelompok-kelompok masyarakat sebagai media peningkatan taraf dan kualitas hidup mereka. Mubyarto dalam Yuniarti (2014) menyatakan bahwa kualitas manusia memang menjadi tujuan pembangunan dan kualitas tersebut yang di mengerti sebagai manusia yang mandiri dan bermanfaat, manusia yang lebih produktif, efisien dan bermoral.

Langkah yang sangat penting dalam proses pelibatan masyarakat itu adalah pembentukan kelompok usaha bersama. Melalui kelompok akan dibina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Hal-hal tersebut dapat pula merujuk kepada ajaran

agama. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan agama atau kepentingan yang sama secara primordial (Yuniarti, 2014).

Keompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemos RI). Program KUBE ini terbentuk dalam dua versi, yakni kelompok yang terbentuk oleh keinginan anggota atau masyarakat yang bersangkutan, adapula yang terbentuk secara dadakan karena akan menerima bantuan dana KUBE. Pembentukan KUBE ini diperlukan pendampingan kepada masyarakat miskin oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah, organisasi sosial maupun dari kalangan akademisi dan pihak lainnya, dikarenakan masyarakat yang menjadi sasaran program ini tidak mengetahui adanya program seperti ini dan tidak tau cara membentuknya.

Pemberdayaan masyarakat perlu digalakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pembentukan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi berdasarkan kepentingan yang sama akan menciptakan terbina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program dan merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan mereka. Mereka akan dibawa beralih dari situasi rutinitas ke situasi kerja kelompok. Disinilah peran motivator luar yang

berfungsi melakukan persiapan sosial menjadi penting. Persiapan sosial tidak lain adalah mengajak segenap anggota kelompok sasaran untuk mulai bersedia melakukan kegiatan mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusinya (Karsidi, 2005).

Hasil penelitian Marwanti (2011) menemukan bahwa rumusan model pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan *life skills* berbasis potensi daerah dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi peserta didik karena mereka tidak hanya memperoleh kemampuan pedagogis melainkan juga kemampuan ekonomis. Dari hasil penelitian dengan pendekatan *research and development* yang dilakukan direkomendasikan agar pendidikan *life skills* berbasis potensi daerah perlu dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan perbedaan potensi lokal daerah dan *life skills* yang diminati peserta didik. Pemberian pelatihan *life skills* yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk bekerja ataupun membuka usaha mandiri.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya melakukan pendampingan pemberdayaan kepada masyarakat saja dalam upaya membentuk KUBE, melainkan harus disertai dengan pembekalan kreatifitas sebagai media untuk menciptakan peluang usaha. Tujuan penulisan artikel ini adalah

untuk memberikan gambaran pelaksanaan program KUBE.

B. LANDASAN TEORITIS

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan orang baik sebagai individu maupun kelompok untuk memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pendekatan yang dipakai dalam menelaah permasalahan kemiskinan sekarang ini lebih mendudukan posisi kelompok miskin itu sebagai *center subject*. Konsep-konsep untuk penanganan masalah kemiskinan mulai menggeser pola yang pada awalnya lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan minimum menjadi pendekatan yang lebih memanusiaikan. Secara umum kemiskinan sekarang dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang

atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor Ekstern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain:

- Ketidak merataan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, yang tidak terbatas pada modal produktif atau aset (tanah, perumahan, kesehatan dan lain-lain), tetapi juga meliputi sumber-sumber keuangan (penghasilan dan kredit). Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
- Keterbatasan informasi, ketidak terjangkau komunikasi, menyebabkan tidak terjangkanya pelayanan dan bantuan dari lembaga pemberi bantuan.
- Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi.
- Adanya kebijakan publik yang bias pihak dan mengorbankan posisi rakyat sebagai implikasi pembangunan.

(Sumber: Ditjen Dayasos & PK, 2014)

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai strategi yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan diantaranya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan sosial. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar

serta berusaha masyarakat miskin. Pemberdayaan sosial juga memfokuskan pada menggerakkan partisipasi sosial masyarakat miskin dengan melibatkan seluruh sasaran diantaranya dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan. Pada dasarnya pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Ditjen Dayasos & PK, 2014).

Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan

anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Ditjen Dayasos & PK, 2014).

KUBE merupakan salah satu target pembangunan pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat miskin. Menurut Bachtiar & Jamaludin (2011) KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin yang meliputi:

1. Terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari,
2. Meningkatnya pendapatan keluarga,
3. Meningkatnya pendidikan, dan
4. Meningkatnya derajat kesehatan.

Dinsos daerah memiliki beberapa penyesuaian-penyesuaian syarat mendirikan KUBE, sehingga biasanya secara umum syarat membentuk Kelompok Usaha Bersama adalah:

1. Anggota KUBE terdiri dari 5-10 anggota masyarakat.
2. Memiliki anggota kepengurusan atau panitia yang nantinya akan mengelola kegiatan usaha yang direncanakan, terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan sisanya berpean sebagai anggota.
3. Anggota KUBE saling mengenal satu sama lain dan memiliki jenis usaha yang seragam (sama), misal anggota KUBE terdiri dari kelompok nelayan atau para petani. Namun jenis usaha yang nantinya akan digeluti boleh beragam, semisal kelompok KUBE pedagang,

Kelompok Usaha Bersama Peternakan Lele, dll

4. Anggota Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok yang memiliki usaha atau kemampuan dalam menjalankan suatu usaha.
5. Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan anggota yang berasal dari desa atau dusun yang sama dan memiliki visi serta misi yang sama.
6. Memiliki satu kantor sebagai pusat pertemuan dengan perlengkapan kantor yang dibutuhkan. Kantor tersebut nantinya berfungsi sebagai fasilitas rapat dan diskusi sesama anggota KUBE.
7. Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan warga Negara asli Indonesia yang memiliki identitas resmi (KTP dan KK).
8. Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan masyarakat yang menjaga tanggungjawab, artinya agar nantinya program KUBE ini tidak berjalan sia-sia (berhenti di tengah jalan karena alasan pesimisme).
9. Harus ada legalitas dari kepala desa atau lurah setempat mengenai kegiatan KUBE ini "Surat Keterangan dari desa atau Kelurahan".

(Sumber: *UMKM online*, 2016)

C. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait

dengan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait dengan peranmanajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teknik analisis data, dilakukan dengan langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian menyajikan hasil.

D. PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Kementerian Sosial memiliki tugas dan fungsi mengentaskan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Salah satu programnya adalah KUBE, yang sudah lama dikenal sebagai trademark dan Icon program di Kementerian Sosial RI, khususnya untuk pemberdayaan warga miskin. KUBE adalah wadah berkumpul warga miskin yang memiliki kesamaan tujuan membangun kesejahteraan melalui wadah kelompok. KUBE merupakan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) yang diluncurkan Pemerintah RI sejak tahun 1983. KUBE ini dibentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

terdapat di Indonesia dapat tereliminir sedikit demi sedikit.

Program KUBE merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan. Prinsip pelaksanaan KUBE adalah:

1. Memperkuat organisasi/lembaga tradisional yang ada di masyarakat .
2. Menumbuhkan lembaga pemberdayaan sosial baru melalui inisiatif lokal.
3. Anggotanya adalah fakir miskin yang memiliki kemauan berusaha .
4. Bertempat tinggal di area yang berdekatan.
5. Kepala Keluarga berusia produktif 18-58 tahun.
6. Pendamping sebagai agen perubahan (agent of change)

Untuk memfasilitasi KUBE dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan memiliki komitmen terhadap Penanggulangan Kemiskinan. Pendamping merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pendamping berperan mempermudah anggota KUBE untuk mengidentifikasi

kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Keterlibatan pendamping ditengah-tengah KUBE bukan sebagai guru tetapi sebagai mitra dan bekerja sama dengan anggota KUBE. Prinsip dasar pendampingan adalah “bekerja bersama” bukan “bekerja untuk”. Pendampingpun diharapkan mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan dan karakteristik masyarakat setempat.

Peran pendamping dalam keberhasilan dan keberlangsungan KUBE cukup besar, namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta tahun 2013, keberadaan pendamping tidak didukung/difasilitasi secara memadai. Temuannya, antara lain:

1. Sebagian besar insentif pendamping di bawah Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per bulannya, merupakan honor yang sangat kecil sekali dan tidak seimbang dengan kebutuhan hidup yang serba mahal di saat ini. Di samping itu besarnya honor tersebut berada di bawah Upah Minimum Regional di seluruh Indonesia yang sudah di atas Rp 1.000.000,-, bahkan di Jakarta UMR sudah mencapai di atas Rp 2.000.000,-. Bagi yang sudah berkeluarga honor tersebut tentu saja semakin tidak mencukupi.

2. Pekerjaan sebagai pendamping sosial hanyalah merupakan pekerjaan sambilan saja, karena hampir seluruhnya mempunyai pekerjaan tetap, ada yang sebagai guru, swasta, bahkan dosenpun juga ada. Sedangkan mereka yang menganggap tugas pendamping sebagai pekerjaan pokok adalah para ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan lainnya sehingga pekerjaan sebagai pendamping sosial merupakan pekerjaan mereka.
3. Sebagian besar pendamping sosial tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis, sedangkan idealnya seorang pendamping sosial adalah tak ubahnya seperti pekerja sosial yang harus melewati masa pelatihan dasar yang diperlukan dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga ia akan memiliki pengetahuan dasar tentang pelayanan sosial dan metode pekerjaan sosial. Memiliki ketrampilan teknis dalam memberikan pelayanan sosial serta memiliki etika sosial dan budaya masyarakat setempat.
4. Setelah lulus seleksi sebagai pendamping sosial biasanya mereka langsung diikutkan pada kegiatan program.
5. Waktu pendampingan sangat terbatas hanya 6 bulan, sedangkan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, lemah.

Perubahan Paradigma merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi pendamping, yaitu adanya kebijakan baru (hasil kesepakatan pertemuan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Sosial dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia pada tanggal 11 – 14 September 2013 di Bandung) mengenai pendampingan KUBE yang berkelanjutan yang sedianya 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan lamanya. Dalam kesepakatan tersebut tertulis: “Jangka waktu pendampingan pada KUBE mulai tahun 2013 minimal selama 3 tahun, dengan ketentuan, honorarium pendamping ditanggung oleh Kementerian Sosial baik melalui APBN pada DIPA Pusat atau Dekonsentrasi dan pada tahun ke 3 ditanggung oleh APBD, dengan ketentuan tahun pertama honorarium dibayarkan 6 bulan dan pada tahun kedua dan ketiga honorarium dibayarkan penuh (12 bulan)”.

Sementara itu, untuk mengubah paradigma lama dengan menghadirkan kebijakan baru tersebut memerlukan pemahaman pendamping tentang:

1. Proses pertolongan pekerjaan sosial yang dimiliki pendamping, relatif rendah.
2. Proses pendampingan KUBE hanya fokus pada KUBE yang baru dibentuk dan pengelolaan bantuan, selesai pada kurun waktu 6 bulan dan tidak dilanjutkan.
3. Pendamping masih berfokus pada apa yang dimiliki oleh kelompok.

4. Belum jelas standar kompetensi pendamping.
5. Waktu pelaksanaan terbatas.
6. Sarana dan prasarana kerja sangat terbatas.
7. Laporan pelaksanaan tugas tidak terstandar.
8. Belum terbangun data base pendamping.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan pendampingan KUBE ini menjadikan efektivitas kinerja pendamping memerlukan kajian lebih dalam pada ranah kebijakan pelaksanaan pendampingan KUBE yang dilaksanakan selama ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KUBE merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan, terutama dalam hal pendampingan program tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial harus menyelenggarakan kegiatan analisis kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut diharapkan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan

kebijakan pendampingan KUBE yang efektif dan berkelanjutan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar & Jamaludin. 2011. *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Ditejn Sumber Daya Sosial & Pengentasan Kemiskinan. 2014. *Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta.
- Karsidi, R. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: LPP UMS & UNS Pers.
- Marwanti. 2011. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui Permainan Kaleng Bersuara di Taman Kanak-kanak Islam Bakti VI Kelompok A Tahun Ajaran 2011/2012*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yiniarti, E. 2014. *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Prasejahtera Di Kelurahan Harapan Jaya Bandar Lampung*. IbM Ristekdikti. Politeknik Negeri Lampung.